

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018-2020

Fauziah Ayu Setyaning Tyas^{1*}, Utpala Rani²

^{1,2} Universitas Tidar, Indonesia

E-mail: ¹⁾ fauziahayu12@gmail.com, ²⁾ utpala@untidar.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo ditinjau dari rasio keuangan tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, dengan data berupa data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020 yang didapat dari website purworejakab.go.id. Data kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan antara lain: analisis varians pendapatan daerah, analisis rasio kemandirian daerah, analisis efektivitas terhadap PAD, dan analisis rasio efisiensi. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020 dikatakan baik dilihat dari varians pendapatan daerah dengan rata-rata 100,53%. Tingkat kemandirian yang masih sangat rendah dengan rata-rata 13,65%, rasio efektivitas PAD dan analisis rasio efisiensi PAD kabupaten Purworejo sangat efektif dan efisien dengan rata-rata analisis masing-masing sebesar 104,8% dan 93,57%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, APBD, Analisis Rasio

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Purworejo Regency in terms of financial ratios for 2018-2020. This study uses a quantitative descriptive analysis method, with data in the form of secondary data, namely the Purworejo Regency Regional Budget Realization Report 2018-2020 obtained from the purworejakab.go.id website. The data were analyzed using financial ratios, including: analysis of regional income variance, analysis of the ratio of regional independence, analysis of effectiveness on PAD, as well as an analysis of efficiency ratios. The results of the study highlight that the financial performance of the Purworejo Regency Regional Revenue and Expenditure Budget for 2018-2020 is said to be good, which can be seen from the regional income variance with an average of 100.53%. Nevertheless, the level of independence is still very low with an average of 13.65%, but the PAD effectiveness ratio and PAD efficiency ratio analysis in Purworejo district are very effective and efficient with an average analysis of 104.8% and 93.57%, respectively.

Keywords: Financial Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Ratio Analysis

1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No.23 tahun 2004 mengenai Pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ada dalam peraturan pemerintah diberi kewenangan yang

luas. Sehingga dari kewenangan otonomi yang luas tersebut memiliki konsekuensi yaitu, kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi jika pemda dapat mengelola potensi daerahnya yaitu potensi SDA, SDM dan potensi sumber daya keuangan secara optimal

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap nasib suatu daerah dinilai cukup besar, apabila pengelolaan keuangan daerah baik, maka akan membuat asset daerah terjaga keutuhannya. Dalam menjalankan tugasnya pemda memiliki kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk dilihat dan dinilai apakah pemda sudah mengelola keuangan daerah dengan baik atau tidak.

Dalam Pengelolaan keuangan daerah dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai juga diperlukan, sehingga tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal saja. Kemampuan pemda dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada, dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Menurut Abdul Halim (2013) kinerja keuangan pemda adalah salah satu tolok ukur yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menjalankan aktivitas otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan juga digunakan sebagai penilaian terhadap kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, data keuangan APBD diperlukan untuk penentuan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kinerja APBD Pemda Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020. Dalam hal ini analisis rasio yang digunakan adalah analisis rasio varians pendapatan, rasio kemandirian, rasio efektifitas pendapatan dan rasio efisiensi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2001, dijelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah berbagai kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah”. Dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa kepengurusan salah satunya adalah kepengurusan umum/pengurusan bendaharawan. Pemda dalam mengelola anggaran/keuangan daerah pemda wajib menerapkan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pemda yaitu seluruh aktivitas yang terdiri dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Dimana kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut dikarenakan jabatan tersebut memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran dari berbagai pilihan ekonomis dan sosial masyarakat di suatu daerah. Dalam melaksanakan peran yang telah diamanahkan oleh masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut, Pemda harus melaksanakan fungsi yang utama, yaitu mengumpulkan sumber daya yang cukup dengan cara yang tepat, dan fungsi yang kedua, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya tersebut secara responsive, efisien dan efektif (Khusaini, 2018; Kumalasari & Riharjo, 2016). Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja).

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemda yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, termasuk tujuan APBD.

Terdapat 4 komponen pembentuk APBD, antara lain ewringkasan pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan.

1. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pos Dana Perimbangan, dan Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah.
2. Belanja daerah terdiri dari Pos Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Dan Pos Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
3. Dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit/surplus APBD. Pada kenyataannya, di dalam APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah dapat ditutup dengan pembiayaan daerah.
4. Pembiayaan Daerah terdiri dari Pos Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.3. Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kriteria keberhasilan kinerja adalah berupa tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Kinerja merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut tingkat keberhasilan/prestasi suatu individu atau organisasi. Kinerja dapat diketahui apabila individu atau organisasi memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan tersebut berupa tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang/organisasi tidak dapat diketahui karena tidak memiliki tolok ukur (Isna et al., 2013).

2.4. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2013), kinerja keuangan pemda merupakan suatu ukuran yang bisa dipergunakan guna melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut Sanjaya & Nugraha (2022) dan Sujarweni (2017), kinerja adalah suatu hasil evaluasi dari kegiatan yang usai dilakukan, hasil dari kegiatan tersebut lalu dijabarkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil evaluasi atas kegiatan atau program yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut Sedarmayanti (2003) kinerja (*performance*) merupakan hasil dari proses manajemen kerja seseorang atau organisasi, dimana nantinya hasil dari kerja tersebut harus dapat diukur dan diperbandingkan dengan standar yang telah ditentukan.

Faktor-faktor kemampuan SDM pemda meliputi kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *ability (knowledge + skill)*, sedangkan faktor motivasi merupakan suatu sikap yang dapat mendorong individu untuk mencapai tujuan pemerintah dimana faktor tersebut terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah ketika menyelesaikan suatu masalah dalam pekerjaannya.

Menurut Mardiasmo (2009) sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan salah satu sistem yang memiliki tujuan untuk membantu manajer publik dalam mengukur tingkat pencapaian suatu tujuan berdasarkan persepsi keuangan dan nonkeuangan.

Dalam penelitian ini, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan tingkat hasil dari pencapaian Kinerja Keuangan Pemda, termasuk anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan perspektif keuangan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Alat ukur yang digunakan tersebut berupa rasio keuangan.

Berdasarkan Kamus akuntansi manajemen kinerja (*performance*) merupakan ukuran dari aktivitas suatu organisasi selama periode tertentu dimana kinerja ini merupakan bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja merupakan suatu sistem finansial atau nonfinansial dari suatu kegiatan yang dilakukan atau pencapaian hasil dari suatu kegiatan. Kinerja keuangan pemda adalah tolok ukur pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran kinerja tersebut adalah berupa rasio keuangan yang tersusun dari laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

2.5. Analisis Kinerja Keuangan APBD

Kinerja keuangan merupakan suatu prestasi yang berhasil dicapai pada anggaran daerah yang telah dibuat dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan. Baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektifitas dan efisiensi tertentu sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan.

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dapat dilihat dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Anggaran. Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat. Untuk pengukurannya dapat dilakukan dengan analisis rasio.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis kinerja keuangan daerah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa analisis yaitu :

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis ini dilaksanakan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

b. Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Menurut Widodo (2001) rasio kemandirian adalah rasio yang menggambarkan kinerja pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dibagi dengan jumlah realisasi pendapatan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah.

c. Analisis Rasio Efektivitas Terhadap PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibandingkan target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya

d. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan pembentukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan.

3. METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020. Data-data LRA tersebut dapat dikumpulkan melalui website kabupaten purworejo.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Tujuan dari desain ini yaitu hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai persoalan yang dipecahkan (Budiati et al., 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Machmud (2016) dan Nurlan (2019), data kuantitatif adalah data statistik yang berbentuk angka baik digali secara langsung dari hasil penelitian maupun penelusuran data online.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan dalam hal ini APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun

2018-2020. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa analisis sebagai berikut :

a. Analisis Varians Pendapatan

$$\text{Analisis Varians Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } t} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Skala Varians Pendapatan

Skala Interval (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
< 100	Kurang Baik
>100	Baik

b. Analisis Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

c. Analisis Rasio Efektivitas Terhadap PAD

$$\text{Analisis Efektifitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Terhadap PAD

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

d. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\text{Analisis Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
100	Efisien Berimbang
< 100	Efisien

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Varian Pendapatan Daerah

Tabel 5 Analisis Varian Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan				Kinerja
	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Varians Pendapatan (Rp)	%	
2018	2.049.783.717.823,00	2.050.879.036.723,00	(1.095.318.900)	99,94%	Kurang Baik
2019	2.172.436.925.113,65	2.184.630.838.836,00	(12.193.913.722)	99,44%	Kurang Baik
2020	2.167.260.086.741,00	2.120.340.261.573,00	46.919.825.168	102,21%	Baik
Rata-rata Varian Pendapatan				100,53%	Baik

Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan Varians Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dikatakan kurang baik hal ini karena pemerintah daerah Kabupaten Purworejo tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan hal ini dapat dilihat dari persentase pada tahun 2018 sebesar 99,94% kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 99,44%. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yakni menjadi 102,21%.

Secara keseluruhan jika dilihat dari rata-rata persentase pencapaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo dari tahun 2018-2020 dapat dikatakan baik yakni mencapai 100,53 % dari anggaran yang ditetapkan.

4.2. Analisis Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 6 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Kemandirian (%)	Kinerja
2018	286.971.121.793,00	2.049.783.717.823,00	14%	Instruktif
2019	280.396.155.599,65	2.172.436.925.113,65	12,90%	Instruktif
2020	304.779.565.558,00	2.167.260.086.741,00	14,06%	Instruktif
Rata-rata			13,65%	Instruktif

Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2020 dapat dikatakan Instruktif atau rendah sekali atau kurang mandiri. Dapat dilihat dari persentase kemandirian daerah tahun 2018 sebesar 14% mengalami penurunan menjadi sebesar 12,90% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 14,06%.

Secara keseluruhan rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Purworejo sebesar 13,65% , yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo belum mampu mengelola sumberdaya yang berada di Kabupaten Purworejo secara maksimal sehingga output pengelolaannya juga belum maksimal, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

4.3. Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 7 Analisis Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Efektivitas %	Kriteria
2018	286.971.121.793,00	278.952.386.723,00	102,87%	Sangat Efektif
2019	280.396.155.599,65	294.463.075.397,00	95,21%	Cukup Efektif
2020	304.779.565.558,00	261.999.024.780,00	116,32%	Sangat Efektif
Rata-rata			104,8%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 dan tahun 2020 tergolong sangat efektif dengan persentase efektivitas sebesar masing-masing sebesar 102,87% dan 116,32%. Dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,21% namun masih tergolong cukup efektif.

Secara keseluruhan rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Purworejo sebesar 104,8%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya dapat dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitasnya bernilai lebih dari 100 %.

4.4. Analisis Rasio Efisiensi PAD

Tabel 8 Analisis Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2018	1.680.531.273.236,00	2.049.783.717.823,00	81,98%	Efisien
2019	2.186.289.226.259,82	2.172.436.925.113,65	100,63%	Tidak Efisien
2020	2.126.472.056.535,00	2.167.260.086.741,00	98,11%	Efisien
Rata-rata			93,57%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas mengenai perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 dan tahun 2019 tergolong efisien dengan persentase masing-masing 81,98% dan 98,11%. Sedangkan pada tahun 2019 tergolong tidak efisein dengan persentase rasio efisiensi sebesar 100,63%.

Secara keseluruhan rata-rata rasio efisiensi PAD Kabupaten Purworejo tergolong efisien dengan persentase sebesar rasio efisiensi sebesar 93,57%.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo selama tahun 2018-2020 sudah terlihat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil rata-rata analisis varians pendapatan mencapai 100,53% dari anggaran yang ditetapkan. Kemudian dilihat dari rata-rata analisis rasio efektifitas PAD dan analisis rasio efisiensi PAD kabupaten Purworejo sangat efektif dan efisien dengan rata rata analisis masing-masing sebesar 104,8% dan 93,57%. 89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Purworejo tergolong baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun Tingkat kemandirian keuangan kabupaten Purworejo tergolong rendah sekali yaitu sebesar 13,65% yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo belum mampu mengelola sumberdaya di Kabupaten Purworejo secara maksimal yang menyebabkan hasil dari output pengelolaanya juga belum maksimal, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka kedepannya Pemerintah Kabupaten Purworejo harus terus memaksimalkan sumber PAD, Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Purworejo secara perlahan bisa mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. S. K. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Budiati, Y., Yani, T. E., & Universari, N. (2012). Minat Mahasiswa Menjadi Wirausaha (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosbud*, 14(1), 89–100.
- Isna, M. N., Rodhiyah, R., & Nurseto, S. (2013). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (studi kasus pada karyawan bagian operasi terminal PT.(PERSERO) PELINDO III Terminal Petikemas Semarang). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3), 19–24.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Machmud, M. (2016). Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. *Research Report*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara.
- Sanjaya, Y. A., & Nugraha, B. (2022). Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Perhotelan. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 61–72.
- Sedarmayanti, D. M. P. (2003). Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern. *Bandung: CV Mandar Maju*.
- Sujarweni, V. W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan; Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*.
- Widodo. (2001). *Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN. UPP YKPN.

